



**RELEVANSI PERATURAN DAERAH DALAM PEROMBAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

BIMA SAPUTRA

1810611039

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI HUKUM**

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

RELEVANSI PERATURAN DAERAH DALAM PEROMBAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

BIMA SAPUTRA
1810611039

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Akhir

Taufiqurrahman, S.H., M.Kn.
M.H.
198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas

Citraresmi Widoretno Putri, S.H.
NIP.
NIP. 19890110201903201



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :
Nama : Bima Saputra
NIM : 1810611039
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : RELEVANSI PERATURAN DAERAH
DALAM PEROMBAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H, M.H

Anggota I

Menra Wijaya, PhD



Suberman, S.H, LL.M

Anggota II

Citraesmi Widoretno Putri, S.H, M.H

Karodi

Abdul Kholiq, S.H, M.H

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14.06.2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Bima Saputra

NIM : 1810611039

Tanggal : 24 Maret 2023

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'MAYORITAS TEMPEL' and a partially visible number '1717000400311118'. The signature is written in a cursive style.

Bima Saputra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bima Saputra

NIM : 1810611039

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **RELEVANSI PERATURAN DAERAH
DALAM PEROMBAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK~~ **SETUJU***) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK~~ **BERSEDIA***) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 24 Maret 2023

Yang menyatakan,



vi

Bima Saputra

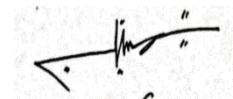
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim syukur alhamdulillah seraya penulis haturkan kepada Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini secara baik dan sesuai waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir, ibu Citraesmi Widoretno Putri, S.H., M.H., atas bimbingan dan arahnya. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, rekan-rekan mahasiswa seperjuangan, serta seluruh pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan oleh karenanya penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai saran dan masukan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak pihak.

Jakarta, 24 Maret 2023



Bima Saputra

ABSTRAK

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah menjadi pusat peradaban kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, seyogyanya Jakarta memerlukan sistematika pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pemerintahan dalam skala daerah dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana perombakan terhadap SKPD memang telah mencuat sejak 2019 silam, dimana sudah sekitar 2 tahun Bapak Anies Rasyid Baswedan sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itulah Gubernur DKI Jakarta menyampaikan rencana perombakan SKPD dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Gubernur menyampaikan akan melakukan perombakan terhadap 42 SKPD yang ada, rinciannya ialah 1 perangkat akan dipecah menjadi 2, kemudian 1 perangkat akan dibubarkan, dan terdapat 5 perangkat yang akan mengalami perubahan nomenklatur. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu dikaji secara mendalam apakah perombakan terhadap SKPD yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan maksimal atau tidak, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Lalu, bagaimana kiranya mekanisme perombakan SKPD yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi peraturan daerah dalam perombakan satuan kerja perangkat daerah terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat penting. Dengan adanya peraturan daerah yang jelas dan tegas, perombakan satuan kerja perangkat daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah urgensi peraturan daerah dalam perombakan satuan kerja perangkat daerah terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat penting.

Kata kunci: Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

ABSTRACT

DKI Jakarta as the capital city has become the center of civilization in Indonesia. Therefore, Jakarta should require a well-organized systematic government. Government on a regional scale is managed through Regional Work Units. The plan to reshuffle the SKPD has indeed surfaced since 2019, where it has been about 2 years since Mr. Anies Rasyid Baswedan was inaugurated as Governor of DKI Jakarta. At that time the Governor of DKI Jakarta conveyed the plan to reshuffle the SKPD in a plenary meeting with the DKI Jakarta DPRD, the Governor said that he would reshuffle the existing 42 SKPD, the details of which were that 1 device would be split into 2, then 1 device would be dissolved, and there were 5 devices that would undergo nomenclature changes. However, in its implementation, it needs to be studied in depth whether the reshuffle of SKPD carried out by the DKI Jakarta Provincial Government has run optimally or not, so that it affects the performance of the DKI Jakarta Provincial Government itself. Then, how should the SKPD reshuffle mechanism be in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia. This research uses a qualitative method with an analytical descriptive approach. The results showed that the urgency of local regulations in the reshuffle of regional work units on the performance of the DKI Jakarta Provincial Government is very important. With the existence of clear and firm regional regulations, the reshuffle of the work unit role is very important.

Keywords: *Regional Apparatus Work Unit, Local Regulation, Government of the Province*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Literature Review.....	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Negara Hukum (<i>Recht Staat</i>).....	14
2. Teori Peraturan Daerah.....	20
3. Teori Pemerintah Daerah.....	24
Tinjauan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	34
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	37
A. Peran Penting Peraturan Daerah bagi Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah.....	37
B. Peraturan Daerah Tentang Perombakan SKPD terkait Perangkat Daerah.....	38
C. Konflik dalam Perombakan SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	40
D. Faktor Pemicu Implementasi Peraturan Daerah Atas Perombakan SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	43
E. Urgensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Relevansi Peraturan Daerah dalam Perombakan SKPD Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	48
B. Struktural Kelembagaan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta..	50

BAB V PENUTUP.....58

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA.....60

LAMPIRAN

1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir
2. Hasil Cek Turnitin
3. Berita Acara Sidang
4. Lembar Perbaikan Ujian Skripsi